

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Laut Tiongkok Selatan merupakan laut berjenis semi tertutup yang memiliki posisi cukup strategis dalam jalur perlayaran internasional yaitu sebagai penghubung jalur laut (*Bottle Neck*) antara Samudera Hindia - Samudera Pasifik sehingga menjadikan Laut Tiongkok Selatan sebagai jalur lalu lintas laut tersibuk di dunia. Tercatat lebih dari setengah perdagangan LNG global, sekitar 24% dari pasokan energi negara-negara Asia Timur dan sepertiga dari total perdagangan global melewati wilayah ini. Laut Tiongkok Selatan juga memiliki cadangan SDA gas alam dan minyak yang besar. Potensi sumberdaya yang besar tersebut diiringi dengan potensi konflik yang cukup besar pula.

Tiongkok menjadi aktor utama yang memicu konflik di wilayah ini dengan mengeluarkan klaim bersifat provokatif, *the 9 dash line* yang jauh melebihi batas-batas wilayah laut sebuah negara yang telah disepakati oleh dunia internasional dalam perjanjian hukum laut UNCLOS pada tahun 1982. Negara-negara yang berada disekitar wilayah LTS (Brunei, Malaysia, Filipina, Vietnam dan Taiwan) segera mengajukan klaimnya masing-masing di beberapa wilayah dengan konsentrasi disekitar kepulauan Spratly, Paratas, Paracel, Macclesfield dan Scarborough. Intensitas konflik semakin meningkat seiring dengan meningkatnya aktivitas di wilayah LTS seperti, eksplorasi gas alam dan minyak, perluasan wilayah penangkapan ikan bahkan sampai pada pembangunan instalasi militer oleh Tiongkok di wilayah Spartly.

ASEAN sebagai organisasi regional yang berada diwilayah konflik telah mengusahakan agar konflik bisa diredakan dan diselesaikan dengan prinsip dan norma yang berlaku atau biasa yang disebut dengan ASEAN *Way*. Prinsip ini mengutamakan cara-cara damai melalui cara perundingan, musyawarah, maupun konsensus. Penyelesaian konflik melalui jalur bilateral dengan Tiongkok dipandang hanya akan merugikan negara-negara Asia Tenggara karena tidak berimbangnya kekuatan antar negara tersebut, sehingga menyelesaikan melalui jalur multilateral menjadi jalan yang pas, namun usaha-usaha tersebut masih belum mencapai titik terang, karena belum adanya perjanjian yang mengikat tentang tata-cara berperilaku di wilayah konflik. Usaha *de-eskalasi* ini semakin diperumit dengan terjadinya perbedaan pendapat negara-negara ASEAN dalam menentukan sikapnya terhadap konflik LTS sehingga untuk pertama kalinya sebuah pertemuan ASEAN gagal menghasilkan *draft communique* yang diperlukan untuk mengurai permasalahan LTS pada pertemuan AMM ke 45 di Kamboja pada tahun 2012.

Indonesia sebagai *natural leader* ASEAN yang selama ini telah secara aktif terlibat dalam setiap perundingan-perundingan damai di konflik Laut Tiongkok Selatan kemudian melakukan usaha mediasi dalam bentuk *shuttle diplomacy*, dimana Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa melakukan perjalanan selama 2 hari ke 4 negara ASEAN yaitu Filipina, Vietnam, Kamboja dan Singapura. Peneliti menemukan bahwa motif utama Indonesia pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono melakukan ini adalah karena alasan keberlangsungan konflik LTS diprediksi akan mempengaruhi kepentingan dari Indonesia di kemudian hari, karena klaim yang dibuat oleh Tiongkok menyinggung garis batas terluar Indonesia di Natuna yang kaya dengan sumber daya gas alam dan cadangan minyak.

Selanjutnya, Indonesia perlu untuk mempertahankan keberlangsungan ASEAN karena selama ini ASEAN merupakan fokus utama kebijakan luar negeri Indonesia dan sehubungan dengan rencana implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Lalu yang terakhir Indonesia melihat mediasi yang dilakukan sebagai peluang untuk memperluas dan meningkatkan pengaruh sekaligus untuk meraih kepercayaan politik dari pihak yang berkonflik. Mediasi yang dilakukan oleh Marty Natalegawa dinilai berhasil dengan disetujuinya *six point principles on the south china sea* 2 hari setelahnya oleh negara-negara yang sebelumnya berbeda pendapat. Mediasi yang dilakukan oleh Marty Natalegawa bisa berhasil dengan waktu cepat karena telah memenuhi 5 prakondisi yang membuat sebuah mediasi bisa berjalan efektif menurut Lawrence Susskind dan Eileen Babbitt yaitu Marty Natalegawa memastikan kesadaran dari negara-negara ASEAN yang terlibat konflik bahwa aksi *unilateral* (sebelah pihak) tidak akan menyelesaikan konflik. Kemudian perjanjian *six point principle on the South China Sea* yang disusun merupakan alternatif untuk menghindarkan efek konflik yang berkepanjangan baik secara ekonomi, politik maupun psikologi.

Langkah selanjutnya Marty Natalegawa menemui menteri urusan Luar Negeri masing-masing negara, sebagai pihak yang memiliki otoritas untuk menentukan kebijakan luar negerinya sehingga perjanjian alternatif yang diusulkan bisa diimplementasikan secara efektif. Selain itu adanya kepentingan dari pihak luar seperti dari Amerika Serikat dan Jepang serta dari Uni Eropa untuk memastikan keamanan jalur perdagangan laut internasional memberikan cukup tekanan untuk segera menyelesaikan konflik melalui cara-cara damai dan perundingan. Yang terakhir adalah faktor dari Indonesia itu sendiri, Indonesia yang bukan merupakan negara pengklaim dan dengan *track recordnya* dalam penanganan konflik di kawasan

telah memudahkan usaha mediasi itu sendiri karena Indonesia bisa memposisikan dirinya sebagai *honest broker* atau pihak ketiga yang netral sehingga bisa lebih diterima oleh negara-negara yang berkonflik.

Pasca pengumuman kesepakatan *Six Point Principle on the South China Sea* oleh Hor Nam Hong selaku *chair* ASEAN telah menyelamatkan wajah ASEAN dari bahaya perpecahan di dalam organisasi itu sendiri untuk sementara waktu dan mengembalikan pengaruh organisasi bagi negara anggotanya. Dihadapan ASEAN yang sudah kembali mencapai satu suara, Tiongkok kemudian merespon kesepakatan ini dengan memerintahkan Menteri Luar Negerinya, Yang Jiechi untuk mengunjungi Indonesia dan Malaysia. Dalam konferensi persnya, Menteri Yang menyebutkan bahwa Tiongkok bersedia untuk memperbaiki kerjasama negaranya dengan ASEAN untuk mengimplementasikan DOC dan memulai proses penyusunan COC atas dasar konsensus yang disepakati. Hal ini bisa terjadi sehubungan dengan status Indonesia yang merupakan anggota G-20, dengan begitu telah menaikkan posisi tawar Indonesia terhadap Tiongkok secara khusus, sehingga Tiongkok tidak bisa mengacuhkan usaha diplomasi yang dicoba lakukan oleh Indonesia